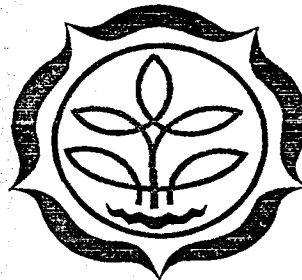


BAGIAN ANGGARAN 018.10



**LAPORAN KEUANGAN
UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BALAI BESAR PELATIHAN PERTANIAN BINUANG
KALIMANTAN SELATAN**

**BADAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA PERTANIAN
DEPARTEMEN PERTANIAN**

**UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2010
TAHUN ANGGARAN 2010**

**Jl. Ahmad Yani Km. 85,5 Binuang Kalimantan Selatan
Telp./Fax. (0517) 36007, 36070**

SISTEMATIKA PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN SATUAN KERJA

Dalam penyusunan laporan keuangan serta untuk mempermudah Satuan Kerja dalam penyajian laporan keuangan, maka kami sampaikan sistematika penyajian laporan keuangan sebagai berikut:

Sistematika penyajian laporan keuangan Satuan Kerja

1. **Sampul Luar**
Merupakan sampul luar dari laporan keuangan, memuat informasi mengenai Satuan Kerja dan periode penyampaian laporan keuangan.
2. **Sampul Dalam**
Merupakan sampul dalam dari laporan keuangan, memuat informasi mengenai satuan kerja dan periode penyampaian laporan keuangan.
3. **Kata Pengantar**
Merupakan pengantar dari laporan keuangan yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang yang memberikan gambaran ringkas mengenai laporan keuangan yang disampaikan.
4. **Daftar Isi**
Merupakan daftar yang memuat isi laporan beserta nomor halamannya.
5. **Daftar Tabel**
Merupakan daftar tabel yang terdapat dalam laporan keuangan. Daftar tersebut memuat nama tabel, nomor tabel dan nomor halamannya.
6. **Daftar Grafik**
Merupakan daftar grafik yang terdapat dalam laporan keuangan. Daftar tersebut memuat nama grafik, nomor dan nomor halamannya.
7. **Daftar Lampiran**
Merupakan daftar lampiran yang terdapat dalam laporan keuangan. Daftar tersebut memuat nama lampiran, nomor lampiran dan nomor halamannya.
8. **Daftar Singkatan**
Merupakan daftar yang memuat singkatan-singkatan yang digunakan dalam laporan keuangan.

9. Pernyataan Tanggung Jawab

Merupakan pernyataan tanggung jawab dari Pengguna Anggaran terhadap penggunaan anggaran pada lingkup satuan kerja yang dipimpinnya. Pernyataan Tanggung Jawab ditandatangani oleh pimpinan Satuan Kerja setiap periode penyampaian laporan keuangan. Pernyataan tanggung jawab paling tidak memuat pernyataan sebagai berikut :

- pernyataan bertanggung jawab terhadap penyusunan dan isi laporan keuangan yang disampaikan;
- pernyataan bahwa laporan keuangan telah disusun sesuai dengan SAP;
- pernyataan laporan keuangan telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai.

10. Ringkasan

Merupakan gambaran ringkas mengenai kondisi laporan keuangan yang dipertanggungjawabkan. Memuat gambaran ringkas mengenai anggaran, realisasi anggaran, neraca dan catatan atas laporan keuangan.

11. Laporan Realisasi Anggaran Satuan Kerja

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi realisasi pendapatan dan belanja, yang masing-masing dibandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.

Laporan realisasi anggaran berdasarkan cetakan dari aplikasi SAI, untuk laporan keuangan periode semesteran, laporan yang disampaikan adalah laporan Semester II. Untuk periode Bulan Desember laporan yang disampaikan adalah laporan komparatif dengan membandingkan anggaran dan realisasi tahun anggaran yang lalu dengan tahun anggaran berjalan.

12. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas akuntansi dan entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, ekuitas dana per tanggal tertentu.

Laporan neraca berdasarkan cetakan dari aplikasi SAI, untuk laporan keuangan periode semesteran, laporan yang disampaikan adalah laporan Semester II. Untuk periode Desember laporan yang disampaikan adalah laporan komparatif dengan membandingkan anggaran dan realisasi tahun anggaran yang lalu dengan tahun anggaran berjalan.

13. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja

Merupakan laporan realisasi anggaran untuk pendapatan dan belanja berdasarkan cetakan dari aplikasi SAI, laporan yang harus disampaikan dapat dilihat pada lampiran laporan keuangan.

14. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan, daftar rinci, dan analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca.

Merupakan unsur pokok, wajib dan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu Laporan Keuangan Satuan Kerja.

15. Lampiran Laporan Keuangan

- a. Laporan-laporan pendukung sebagai lampiran
 - i) LRA Pendapatan dan LRA Pengembalian Pendapatan
 - ii) LRA Belanja dan LRA Pengembalian Belanja
 - iii) Neraca Percobaan
(daftar laporan lihat lampiran III)
- b. Laporan barang pengguna
 - i) Laporan Barang Pengguna Semesteran
 - ii) Laporan Kondisi Barang (*khusus LKKL Semesteran*)
 - iii) Rincian Saldo Awal
(daftar laporan lihat lampiran III)
- c. Laporan Keuangan BLU
- d. Laporan Rekening Pemerintah
- e. Tindak Lanjut Atas Temuan BPK
- f. Lampiran-lampiran lainnya sebagai pendukung CaLK

16. Lampiran lainnya sebagai pendukung Catatan

- a. Laporan Barang Kuasa Pengguna Barang Persediaan dll.

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Menteri/Pimpinan Lembaga, sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Satuan Kerja yang dipimpinnya.

Balai Besar Pelatihan Pertanian Binuang adalah entitas akuntansi dari Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian Departemen Pertanian yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan.


Penyusunan laporan keuangan Balai Besar Pelatihan Pertanian Binuang mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat serta Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-51/PB/2008 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Informasi yang disajikan di dalamnya telah disusun sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Sehubungan dengan Laporan Keuangan Semester II Tahun Anggaran 2010 ini, perlu kami kemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Laporan Realisasi Anggaran memberikan informasi tentang realisasi pendapatan dan belanja. Berdasarkan laporan ini, realisasi Pendapatan Negara dan Hibah untuk bulan yang berakhir 31 Desember 2010 adalah sebesar Rp.61.096.250,- atau persen dari yang ditetapkan dalam DIPA TA 2010. Sementara itu, realisasi Anggaran Belanja Negara adalah sebesar Rp.13.214.584.349,- atau 82,34 persen dari Anggaran sebesar Rp. 16.048.651.000,- yang dianggarkan dalam DIPA TA 2010 dan Dana SKPA Pusat tahun 2010;
2. Neraca menyajikan informasi tentang posisi aset, kewajiban, dan ekuitas kementerian negara/lembaga, untuk Semester II (Periode 31 Desember) Tahun Anggaran 2010. Dari Neraca tersebut diinformasikan bahwa nilai Aset adalah sebesar Rp.10.580.817.263,-, Kewajiban sebesar Rp.0,- dan Cadangan Barang Persediaan Rp. 110.000,- sehingga Ekuitas Dana (kekayaan bersih) Balai Besar Pelatihan Pertanian Binuang per 31 Desember 2010 adalah sebesar Rp 10.580.817.263,- Catatan atas Laporan Keuangan dimaksudkan agar pengguna laporan keuangan dapat memperoleh informasi yang lebih lengkap tentang hal-hal yang termuat dalam laporan keuangan. Catatan atas Laporan Keuangan meliputi uraian tentang kebijakan fiskal, kebijakan akuntansi, dan penjelasan pos-pos laporan keuangan, daftar rinci atau uraian atas nilai pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca.

Kami menyadari bahwa laporan keuangan Semester II Tahun Anggaran 2010 ini masih belum sempurna, oleh sebab itu kami mengharapkan tanggapan, saran, maupun kritik yang membangun dari para pengguna laporan keuangan ini. Kami akan terus berupaya untuk dapat menyusun dan menyajikan laporan keuangan yang tepat waktu dan akurat sehingga terwujud tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Diharapkan penyusunan Laporan Keuangan ini dapat meningkatkan akuntabilitas publik.

Binuang, Januari 2011
Kepala Balai Besar Pelatihan Pertanian Binuang,



Ir. Edy Ashariyono
NIP. 19540904 198303 1 001

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Lampiran	iii
Daftar Singkatan	iv
Indeks Catatan atas Laporan Keuangan	v
Pernyataan Tanggung Jawab	vi
I. Ringkasan	1
II. Laporan Realisasi Anggaran (LRA perbandingan 2010 dan 2009	1
III. Neraca (NSAIKPT perbandingan 2010 dan 2009)	2
IV. Catatan atas Laporan Keuangan	2
A. Penjelasan Umum	3
A.1. Dasar Hukum	3
A.2. Kebijakan Teknis Satuan Kerja	3
A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan	4
A.4. Kebijakan Akuntansi	5
B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	11
B.1. Penjelasan Umum Laporan Realisasi Anggaran	11
B.2. Penjelasan Per Pos Laporan Realisasi Anggaran	11
B.3. Catatan Penting/Pengungkapan Lainnya	14
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	15
C.1. Posisi Keuangan Secara Umum	15
C.2. Penjelasan Per Pos Neraca	17
C.3. Catatan Penting/Pengungkapan Lainnya	23
Laporan-laporan Pendukung sesuai Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-51/PB/2008	...
• LRA Pendapatan dan LRA Pengembalian Pendapatan	...
• LRA Belanja dan LRA Pengembalian Belanja	...
• Neraca Percobaan	...
Laporan Barang Pengguna	...
• Laporan Barang Pengguna Semesteran/Tahunan	...
• Laporan Kondisi Barang	...
Lampiran Laporan Keuangan dan Neraca	...
Lampiran Laporan Rekening Pemerintah	...
Lampiran-lampiran lainnya sebagai pendukung CaLK	...

DAFTAR SINGKATAN

APBN	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
APBN-P	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan
BLU	: Badan Layanan Umum
BPK	: Badan Pemeriksa Keuangan
BUN	: Bendahara Umum Negara
DIPA	: Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
LRA	: Laporan Realisasi Anggaran
MA	: Mata Anggaran Penerimaan / Pengeluaran
PNBP	: Penerimaan Negara Bukan Pajak
SIMAK-BMN	: Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara
SAI	: Sistem Akuntansi Instansi
SAK	: Sistem Akuntansi Keuangan
SAP	: Standar Akuntansi Pemerintahan
SKPA	: Surat Kuasa Pengguna Anggaran
TA	: Tahun Anggaran
TAB	: Tahun Anggaran Berjalan
TAYL	: Tahun Anggaran Yang Lalu
TGR	: Tuntutan Ganti Rugi
TPA	: Tagihan Penjualan Angsuran
UP	: Uang Persediaan

INDEKS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

LAPORAN REALISASI APBN

Halaman

Pendapatan Negara dan Hibah

Catatan B.2.1	Pendapatan Negara dan Hibah	...
Catatan B.2.1.1	Penerimaan Perpajakan	...
Catatan B.2.1.1.1	Pajak Dalam Negeri	...
Catatan B.2.1.1.2	Pajak Perdagangan Internasional	...
Catatan B.2.1.2	Penerimaan Negara Bukan Pajak	...
Catatan B.2.1.2.1	Penerimaan Sumber Daya Alam	...
Catatan B.2.1.2.2	Bagian Pemerintah atas Laba BUMN	...
Catatan B.2.1.2.3	Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	...
Catatan B.2.1.3	Penerimaan Hibah	...

Belanja Negara

Catatan B.2.2	Belanja Negara	...
Catatan B.2.2.1	Belanja Pemerintah Pusat	...

NERACA

ASET

Aset Lancar

Catatan C.2.1	Kas di Bendahara Pengeluaran	...
Catatan C.2.2	Kas di Bendahara Penerimaan	...
Catatan C.2.3	Kas pada Badan Layanan Umum	...
Catatan C.2.4	Piutang Pajak	...
Catatan C.2.5	Piutang Bukan Pajak	...
Catatan C.2.6	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	...
Catatan C.2.7	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	...
Catatan C.2.8	Uang muka belanja	...
Catatan C.2.9	Piutang dari kegiatan Operasional Badan Layanan Umum	...
Catatan C.2.10	Piutang dari kegiatan Non Operasional Badan Layanan Umum	...
Catatan C.2.11	Investasi Jangka Pendek - Badan Layanan Umum	...
Catatan C.2.12	Piutang Lainnya	...
Catatan C.2.13	Persediaan	...
Catatan C.2.14	Persediaan Badan Layanan Umum	...

Investasi Jangka Panjang

Catatan C.2.15	Investasi Non Permanen Badan Layanan Umum	...
Catatan C.2.16	Investasi Permanen Badan Layanan Umum	...
Catatan C.2.18	Aset Tetap	...
Catatan C.2.19	Aset Lainnya	...

KEWAJIBAN

	Kewajiban Jangka Pendek	...
Catatan C.2.20	Utang kepada Pihak Ketiga	...
Catatan C.2.21	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan	...
Catatan C.2.22	Uang Muka dari Rekening Khusus	...
Catatan C.2.23	Uang Muka dari BUN	...
Catatan C.2.24	Uang Muka dari KPKN	...
Catatan C.2.25	Pendapatan yang Ditangguhkan	...
Catatan C.2.27	Utang Jangka Pendek Lainnya	...

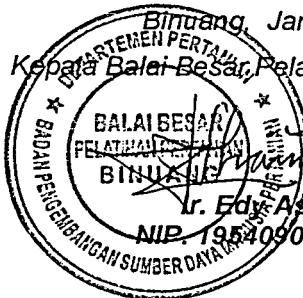
EKUITAS

Catatan C.2.28	Cadangan Piutang	...
	Cadangan Persediaan	...
	Ekuitas Dana Lancar	...
Catatan C.2.29	Dana Lancar Lainnya	...
Catatan C.2.30	Cadangan Piutang	...
Catatan C.2.31	Cadangan Persediaan	...
Catatan C.2.32	Pendapatan yang Ditangguhkan	...
Catatan C.2.33	Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek	...
	Ekuitas Dana Investasi	...
Catatan C.2.34	Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang	...
Catatan C.2.35	Diinvestasikan dalam Aset Tetap	...
Catatan C.2.36	Diinvestasikan dalam Aset Lainnya	...
Catatan C.2.37	Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang	...

**PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
KEPALA SATUAN KERJA
BALAI BESAR PELATIHAN PERTANIAN BINUANG
KALIMANTAN SELATAN**

Laporan Keuangan Balai Besar Pelatihan Pertanian Binuang yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan Semester II Tahun Anggaran 2010 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Binuang, Januari 2011
Kepala Balai Besar Pelatihan Pertanian Binuang,

Ir. Edy Asmariyono
NIP. 19540904 198303 1 001

Laporan Keuangan Satuan Kerja Balai Besar Pelatihan Pertanian Binuang Semester I TA 2010

RINGKASAN

Berdasarkan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007, menteri/pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal, dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

Laporan Keuangan Balai Besar Pelatihan Pertanian Binuang Semester II Tahun 2010 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) TA 2010 dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan, belanja, selama periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2010.

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah pada Semester II Tahun Anggaran 2010 terdiri dari Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp. Rp.61.069.250,- dari yang dianggarkan.

Realisasi Belanja Negara pada Semester II Tahun Anggaran 2010 adalah sebesar Rp. 13.214.584.349,- atau mencapai 82,34 persen dari anggarannya.

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Semester I Tahun Anggaran 2010 dan 2009 dapat disajikan sebagai berikut :

URAIAN	(dalam rupiah)			
	SEMESTER II T.A. 2010		SEMESTER II T.A. 2009	
	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI
Pendapatan Negara dan Hibah	70,300,000	61,069,250	54,800,000	97,391,099
Belanja Rupiah Murni (RM)	16,048,651,000	13,214,584,349	11,813,786,000	9,631,122,575
Belanja Pinjaman Luar Negeri	-	-	-	-
Belanja Hibah	-	-	-	-
Jumlah :	16,118,951,000	13,275,653,599	11,868,586,000	9,728,513,674

Laporan Keuangan Satuan Kerja Balai Besar Pelatihan Pertanian Binuang Semester I TA 2010

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal pelaporan dan dibandingkan dengan tanggal pelaporan sebelumnya.

Jumlah Aset adalah sebesar Rp.10.580.817.263,- yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp. 0,- Cadangan Persediaan Rp. 110.000,- Aset Tetap sebesar Rp.10.424.296.143,- dan Aset Lainnya sebesar Rp.156.411.120,-

Jumlah Kewajiban adalah sebesar Rp.0,- yang merupakan Kewajiban Jangka Pendek.

Sementara itu jumlah Ekuitas Dana adalah sebesar Rp. 10.580.817.263,- yang terdiri dari Ekuitas Dana Lancar sebesar Rp.0,- dan Ekuitas Dana Investasi sebesar Rp. 10.580.817.263,-

Ringkasan Neraca per 31 Desember 2010 dan 31 Desember 2009 dapat disajikan sebagai berikut:

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		(dalam rupiah)
	(31 Desember) 2010	(31 Desember) 2009	Nilai/Kenaikan Penurunan
Aset			
Aset Lancar	-	-	-
Persediaan	110,000	-	
Aset Tetap	10,424,296,143	10,251,661,593	172,634,550
Aset Tetap Lainnya	156,411,120	156,411,120	-
Kewajiban			
Kewajiban Jangka Panjang	-	-	-
Ekuitas Dana			
Ekuitas Dana Lancar	-	-	-
Ekuitas Dana Investasi	10,580,817,263	10,408,072,713	172,744,550

3. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menguraikan dasar hukum, metodologi penyusunan Laporan Keuangan, dan kebijakan akuntansi yang diterapkan. Selain itu, dalam CaLK dikemukakan penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran, pendapatan, dan belanja diakui berdasarkan basis kas, yaitu pada saat kas diterima atau dikeluarkan oleh dan dari Kas Umum Negara (KUN). Sementara itu, dalam penyajian Neraca, aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui berdasarkan basis akrual, yaitu pada saat diperolehnya hak atas aset dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan oleh dan dari KUN.

Dalam CaLK ini diungkapkan pula kejadian penting setelah tanggal pelaporan keuangan serta informasi tambahan yang diperlukan.

A. PENJELASAN UMUM

Dasar Hukum

A.1. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.
7. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER/PB/ tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.

A.2. KEBIJAKAN TEKNIS BBPP Binuang

RENCANA STRATEGIS BBPP Binuang

PENDAPATAN BBPP Binuang

Pendapatan negara yang ada di BBPP Binuang berasal dari Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP), untuk Semester II tahun 2010 anggaran pendapatan yang direncanakan BBPP Binuang sebesar Rp 70.300.000,- dengan realisasi hingga semester II (31 Desember 2010) sebesar Rp 61.096.250,- dari yang direncanakan. Realisasi PNBP tersebut berasal dari Pendapatan Sewa Gedung dan Bangunan Pemerintah, Penjualan Hasil Pertanian, dan Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian pekerjaan pemerintah.

BELANJA BBPP Binuang

Untuk Tahun Anggaran 2010, Balai Besar Pelatihan Pertanian Binuang memiliki anggaran belanja yang berasal dari dana APBN RM sebesar Rp 7.310.995.000,- yang terdiri dari anggaran DIPA BBPP Binuang No. 0181/018-10.2/XIII/2010 tanggal 31 Desember 2009 sebesar Rp 7.310.995.000,-, Anggaran SKPA Badan Pengembangan SDM Pertanian Jakarta No. 0030/WPB.11/KP.05/2010 tanggal 02 Juni 2010 sebesar Rp 150.290.000,- Anggaran SKPA Badan Pengembangan SDM Pertanian Jakarta No. SKPA-0268/WPB.12/KP.05/2010 tanggal 24 Agustus 2010 sebesar Rp 7.412.120.000,- Anggaran SKPA Badan Pengembangan SDM Pertanian Jakarta No. SKPA - 516/WPB.12/KP.0522/2010

Laporan Keuangan Satuan Kerja Balai Besar Pelatihan Pertanian Binuang Semester II T A 2010

tanggal 11 Nopember 2010 sebesar Rp 1.162.646.000,- Anggaran tersebut diatas terdiri dari anggaran Belanja Pegawai sebesar Rp 3.061.659.000,-, anggaran Belanja Barang sebesar Rp 12.811.992.000,- dan Anggaran Belanja Modal sebesar Rp 175.000.000,-. Selama periode semester II tahun 2010 (31 Desember 2010) realisasi anggaran belanja BBPP Binuang pad semester II mencapai sebesar 82,35 % dari anggaran yang ada atau sebesar Rp 13.217.739.252,-

A.3. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Balai Besar pelatihan Pertanian Binuang Semester II Tahun 2010 merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh ensitas akuntansi Balai Besar pelatihan Pertanian Binuang .

Balai Besar pelatihan Pertanian Binuang Tahun Anggaran 2010 ini memperoleh anggaran yang berasal dari APBN sebesar Rp. 16.048.651.000

Dari total anggaran di atas, rincian anggaran BBPP Binuang adalah sebagai berikut :

Tahun Anggaran	JENIS SUMBER DANA	
	APBN	BLU
2009	11,627,525,000	-
2010	16,048,651,000	-

Balai Besar Pelatihan Pertanian Binuang hanya memperoleh dana dari DIPA BA 018, dan tidak mengelola dana yang berasal dari BA 062 (Subsidi dan Transfer) dan BA 069 (Belanja Lain-lain)

Laporan Keuangan dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI), yang terdiri dari Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN).

SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran
2. Neraca
3. Catatan atas Laporan Keuangan

Data BMN yang disajikan dalam neraca ini telah seluruhnya diproses melalui SIMAK-BMN.

Laporan Keuangan Satuan Kerja Balai Besar Pelatihan Pertanian Binuang Semester II T A 2010

Kebijakan
Akuntansi**A.4. KEBIJAKAN AKUNTANSI**

Laporan Realisasi Anggaran disusun menggunakan basis kas yaitu basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN) atau dikeluarkan dari KUN.

Penyajian aset, kewajiban, dan ekuitas dana dalam Neraca diakui berdasarkan basis akrual, yaitu pada saat diperolehnya hak atas aset dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan dari KUN.

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2010 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Dalam penyusunan LKKL telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Prinsip-prinsip akuntansi yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan BBPP Binuang adalah:

Pendapatan

(1) Pendapatan

Pendapatan adalah semua penerimaan KUN yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah pusat dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah pusat. Pendapatan diakui pada saat kas diterima pada KUN. Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pendapatan disajikan sesuai dengan jenis pendapatan.

Belanja

(2) Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran KUN yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah pusat. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). Belanja disajikan di muka (*face*) laporan keuangan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja, sedangkan di Catatan atas Laporan Keuangan, belanja disajikan menurut klasifikasi organisasi dan fungsi.

Aset

(3) Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut, dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat diterima atau pada saat

hak kepemilikan berpindah.

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

Aset Lancar mencakup kas dan setara kas yang diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar ini terdiri dari kas, piutang, dan persediaan.

Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.

Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihannya.

Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai bagian lancar TPATGR.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan dicatat di neraca berdasarkan:

- harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian,
- harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri,
- harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.

Investasi

b. Investasi^{*)}

Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomik seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Investasi pemerintah diklasifikasikan kedalam investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang. Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki dalam kurun waktu setahun atau kurang. Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari setahun.

Investasi jangka panjang dibagi menurut sifat penanaman investasinya, yaitu non permanen dan permanen.

(i) Investasi Non Permanen

Investasi non permanen adalah investasi jangka panjang yang tidak termasuk dalam investasi permanen dan dimaksudkan untuk dimiliki

^{*)} jika terdapat transaksi investasi pada kementerian negara/lembaga yang bersangkutan

Laporan Keuangan Satuan Kerja Balai Besar Pelatihan Pertanian Binuang Semester II T A 2010

secara tidak berkelanjutan. Investasi non permanen sifatnya bukan penyertaan modal saham melainkan berupa pinjaman jangka panjang yang dimaksudkan untuk pembiayaan investasi perusahaan negara/ daerah, pemerintah daerah, dan pihak ketiga lainnya.

Investasi Non Permanen meliputi:

- Seluruh dana pemerintah yang bersumber dari dana pinjaman luar negeri yang diteruskanpinjamkan melalui *Subsidiary Loan Agreement* (SLA) dan dana dalam negeri dalam bentuk Rekening Dana Investasi (RDI) dan Rekening Pembangunan Daerah (RPD) yang dipinjamkan kepada BUMN/BUMD dan Pemda.
- Seluruh dana pemerintah yang diberikan dalam bentuk Pinjaman Dana Bergulir kepada pengusaha kecil, anggota koperasi, anggota Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM), nasabah Lembaga Dana Kredit Pedesaan (LDKP), nasabah Usaha Simpan Pinjam/Tempat Simpan Pinjam (USP/TSP) atau nasabah BPR.

(ii) Investasi Permanen

Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Investasi permanen dimaksudkan untuk mendapatkan dividen atau menanamkan pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang. Investasi permanen meliputi seluruh Penyertaan Modal Negara (PMN) pada perusahaan negara, lembaga internasional, dan badan usaha lainnya yang bukan milik negara. PMN pada badan usaha atau badan hukum lainnya yang sama dengan atau lebih dari 51 persen disebut sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Hukum Milik Negara (BHMN). PMN pada badan usaha atau badan hukum lainnya yang kurang dari 51 persen (minoritas) disebut sebagai Non BUMN.

PMN dapat berupa surat berharga (saham) pada suatu perseroan terbatas dan non surat berharga, yaitu kepemilikan modal bukan dalam bentuk saham pada perusahaan yang bukan perseroan.

Penilaian investasi jangka panjang diprioritaskan menggunakan metode ekuitas. Jika suatu investasi bisa dipastikan tidak akan diperoleh kembali atau terdapat bukti bahwa investasi hendak dilepas, maka digunakan metode nilai bersih yang direalisasikan. Investasi dalam bentuk pinjaman jangka panjang kepada pihak ketiga dan *non earning asset* atau hanya sebagai bentuk partisipasi dalam suatu organisasi, seperti penyertaan pada lembaga-lembaga keuangan internasional, menggunakan metode biaya.

Investasi dalam mata uang asing dicatat berdasarkan kurs tengah BI pada tanggal transaksi. Pada setiap tanggal neraca, pos investasi dalam mata uang asing dilaporkan ke dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.

Aset Tetap

c. Aset Tetap

Aset tetap mencakup seluruh aset yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun. Aset tetap dilaporkan pada neraca Satker per 31 Desember 2010 berdasarkan harga perolehan.

Pengakuan aset tetap yang perolehannya sejak tanggal 1 Januari 2002 didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi, yaitu:

- (a.) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah), dan
- (b.) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah).
- (c.) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

Aset Lainnya

d. Aset Lainnya

Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, investasi jangka panjang, dan aset tetap. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun, Kemitraan dengan Pihak Ketiga, Dana yang Dibatasi Penggunaannya, Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain.

TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.

TGR merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap bendahara/pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh bendahara/pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.

TPA dan TGR yang akan jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai aset lainnya.

Kemitraan dengan pihak ketiga merupakan perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki.

Dana yang Dibatasi Penggunaannya merupakan kas atau dana yang alokasinya hanya akan dimanfaatkan untuk membiayai kegiatan tertentu seperti kas besi perwakilan RI di luar negeri, rekening dana reboisasi, dan dana moratorium Nias dan Nanggroe Aceh Darussalam (NAD).

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam

Laporan Keuangan Satuan Kerja Balai Besar Pelatihan Pertanian Binuang Semester II T A 2010

menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Aset Tak Berwujud meliputi software komputer; lisensi dan *franchise*; hak cipta (*copyright*), paten, *goodwill*, dan hak lainnya, hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang.

Aset Lain-lain merupakan aset lainnya yang tidak dapat dikategorikan ke dalam TPA, Tagihan TGR, Kemitraan dengan Pihak Ketiga, maupun Dana yang Dibatasi Penggunaannya. Aset lain-lain dapat berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah.

Di samping itu, piutang macet Satker yang dialihkan penagihannya kepada Departemen Keuangan cq. Ditjen Kekayaan Negara juga termasuk dalam kelompok Aset Lain-lain.

Kewajiban

(4) Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintahan lain, atau lembaga internasional. Kewajiban pemerintah juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah. Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan.

Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, Utang Bunga (*accrued interest*) dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Aliran ekonomi sesudahnya seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian karena perubahan kurs mata uang asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut.

Laporan Keuangan Satuan Kerja Balai Besar Pelatihan Pertanian Binuang Semester II T A 2010

Ekuitas Dana

(5) Ekuitas Dana

Ekuitas dana merupakan kekayaan bersih pemerintah, yaitu selisih antara aset dan utang pemerintah. Ekuitas dana diklasifikasikan Ekuitas Dana Lancar dan Ekuitas Dana Investasi. Ekuitas Dana Lancar merupakan selisih antara aset lancar dan utang jangka pendek. Ekuitas Dana Investasi mencerminkan selisih antara aset tidak lancar dan kewajiban jangka panjang.

Laporan Keuangan Satuan Kerja Balai Besar Pelatihan Pertanian Binuang Semester II 2010

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

B.1. PENJELASAN UMUM LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Realisasi anggaran pada TA 2010 dengan jumlah rupiah realisasi dan persentase dari anggarannya terdiri dari:

1. Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah yaitu Pendapatan Negara Bukan Pajak
2. Realisasi Belanja Negara yaitu Belanja Rupiah Murni

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	Real. Angg.
1	Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah	Rp 70,300,000	Rp 61,096,250	86.91%
	-Penerimaan Pajak	Rp -	Rp -	0.00%
	-Penerimaan Negara Bukan Pajak	Rp 70,300,000	Rp 61,096,250	86.91%
	-Penerimaan hibah	Rp -	Rp -	-
2	Realisasi Belanja Negara	Rp 16,048,651,000	Rp 13,214,584,349	82.34%
	-Belanja Rupiah Murni	Rp 16,048,651,000	Rp 13,214,584,349	82.34%

B.2. PENJELASAN PER POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

B.2.1. Pendapatan Negara dan Hibah

Komposisi realisasi Pendapatan Negara dan Hibah (dalam persentase) TA 2010 dapat dilihat pada Grafik dibawah ini:

B.2.2. Belanja Negara

Anggaran belanja yang dialokasikan pada BBPP Binuang untuk Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp 16.048.651.000,- yang berasal dari DIPA sebesar Rp 7.310.995.000,- dan SKPA Badan Pengembangan Sumber Daya Pertanian sebesar Rp 8.725.056.000,- Dengan realisasi sebesar Rp 13.214.584.349,- atau sebesar 82,34 % dari anggarannya.

Komposisi alokasi asal dana belanja terdiri dari (i) Belanja Rupiah Murni dan (ii) Penerimaan Negara Bukan Pajak. Pada semester II TA 2010 belanja rupiah murni sebesar Rp 16.048.651.000,- dan belanja PNPB sebesar Rp 70.300.000,-

Laporan Keuangan Satuan Kerja Balai Besar Pelatihan Pertanian Binuang Semester II 2010

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

B.1. PENJELASAN UMUM LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Realisasi anggaran pada TA 2010 dengan jumlah rupiah realisasi dan persentase dari anggarannya terdiri dari:

1. Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah yaitu Pendapatan Negara Bukan Pajak
2. Realisasi Belanja Negara yaitu Belanja Rupiah Murni

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	Real. Angg.
1	Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah	Rp 70,300,000	Rp 58,187,250	82.77%
	-Penerimaan Pajak	Rp -	Rp -	0.00%
	- Penerimaan Negara Bukan Pajak	Rp 70,300,000	Rp 58,187,250	82.77%
	-Penrimaan hibah	Rp -	Rp -	-
2	Realisasi Belanja Negara	Rp 16,048,651,000	Rp 13,217,739,252	82.36%
	- Belanja Rupiah Murni	Rp 16,048,651,000	Rp 13,217,739,252	82.36%

B.2. PENJELASAN PER POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

B.2.1. Pendapatan Negara dan Hibah

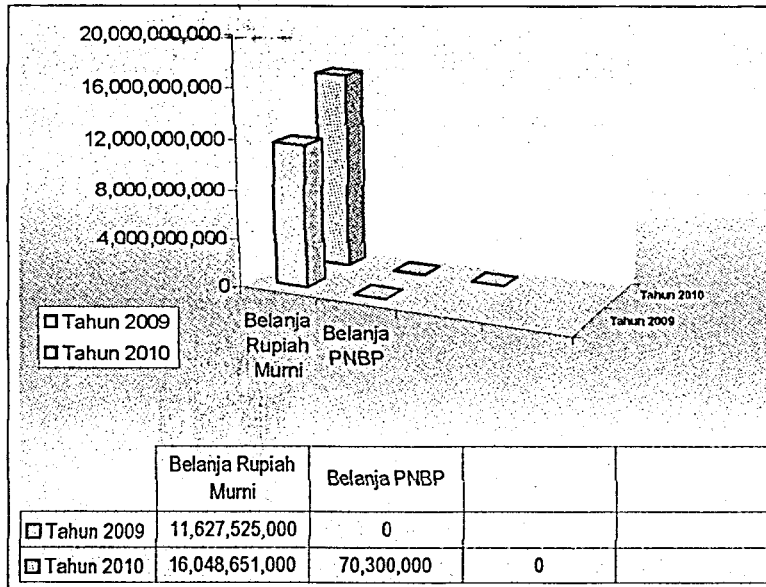
Komposisi realisasi Pendapatan Negara dan Hibah (dalam persentase) TA 2010 dapat dilihat pada Grafik dibawah ini:

B.2.2. Belanja Negara

Anggaran belanja yang dialokasikan pada BBPP Binuang untuk Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp 16.048.651.000,- yang berasal dari DIPA sebesar Rp 7.310.995.000,- dan SKPA Badan Pengembangan Sumber Daya Pertanian sebesar Rp 8.725.056.000,- Dengan realisasi sebesar Rp 13.217.739.252,- atau sebesar 82,35 % dari anggarannya.

Komposisi alokasi asal dana belanja terdiri dari (i) Belanja Rupiah Murni dan (ii) Penerimaan Negara Bukan Pajak. Pada semester II TA 2010 belanja rupiah murni sebesar Rp 7.461.285.000,- dan belanja PNPB sebesar Rp 70.300.000,-

Laporan Keuangan Satuan Kerja Balai Besar Pelatihan Pertanian Binuang Semester II 2010

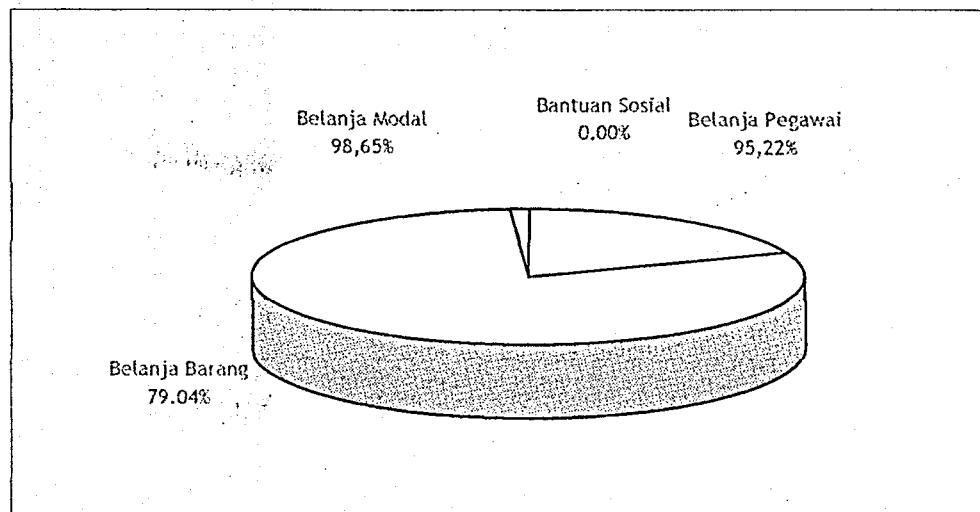


Realisasi
 Belanja Rp...

B.2.2.1. Belanja

Komposisi realisasi Belanja Pemerintah Pusat menurut jenis belanja dapat disajikan seperti Grafik di bawah ini:

Belanja
 Pemerintah
 Pusat
 menurut
 Jenis Belanja



Grafik: Komposisi Realisasi Belanja Pemerintah Pusat menurut Jenis Belanja TA 2010

Laporan Keuangan Satuan Kerja Balai Besar Pelatihan Pertanian Binuang Semester II 2010

*Belanja
Pegawai
Rp...*

Belanja Pegawai

Anggaran belanja pegawai sebesar Rp 3.061.659.000,- terealisasi sebesar 95,22 % yaitu Rp 2.915.333.746,-

Rincian realisasi Belanja Pegawai kotor sebelum pengembalian (diambil dari nilai SPM) semester II

Rincian realisasi Belanja Pegawai adalah sebagai berikut:

Uraian	Jan/Des 2009	Jan/Des 2010	% Naik/(Turun)
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	Rp 919,555,880	Rp 1,877,091,620	Rp 1.04
Belanja Pembulatan Gaji PNS	Rp 26,378	Rp 49,787	Rp 0.89
Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	Rp 64,652,024	Rp 137,087,476	Rp 1.12
Belanja Tunj. Anak PNS	Rp 20,760,429	Rp 37,804,117	Rp 0.82
Belanja Struktural PNS	Rp 62,295,000	Rp 102,905,000	Rp 0.65
Belanja Fungsional PNS	Rp 82,355,000	Rp 143,350,000	Rp 0.74
Belanja PPh PNS	Rp 27,914,190	Rp 46,557,049	Rp 0.67
Belanja Beras PNS	Rp 45,738,000	Rp 129,073,500	Rp 1.82
Belanja Uang makan	Rp 62,865,000	Rp 247,805,000	Rp 2.94
Belanja Tunj.Kompensasi Kerja PNS	Rp -	Rp -	
Belanja Tunj Umum	Rp 52,245,000	Rp 110,335,000	Rp 1.11
Belanja Uang honor tetap/	Rp 30,260,000	Rp 83,280,000	Rp 1.75
Belanja Pegawai/Tunj. Khusus			
Total : .	Rp 1,368,666,901	Rp 2,915,338,549	Rp 1.13

Belanja Barang

Anggaran Belanja Barang pada Balai Besar Pelatihan Pertanian Binuang untuk Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp 12.811.992.000,- terealisasi sebesar 79,04 % yaitu Rp 10.127.216.153,-

Rincian realisasi belanja barang kotor sebelum pengembalian (diambil dari nilai SPM) semester II tahun 2010 dibandingkan dengan semester II tahun 2009 adalah sebagai berikut Rincian realisasi Belanja Barang adalah sebagai berikut:

Laporan Keuangan Satuan Kerja Balai Besar Pelatihan Pertanian Binuang Semester II 2010

Uraian	30 Jan/31 Des 2009	30 Jan/31 Des2010	% Naik/(Turun)
Belanja Barang Operasional	-	Rp -	-
Belanja Barang Non Operasional	Rp -	Rp -	-
Belanja Jasa	Rp -	Rp -	-
Belanja Pemeliharaan	-	Rp -	-
Belanja Perjalanan	Rp -	Rp -	-
Jumlah	Rp -	Rp -	-

Belanja Modal

Anggaran Belanja Modal pada Balai Besar Pelatihan Pertanian Binuang untuk Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp 175.000.000,- terealisasi sebesar 98,65 % yaitu Rp 172.634.550,-

Rincian realisasi Belanja Modal adalah sebagai berikut:

Uraian	30 Des 2010	30 Desi 2009	% Naik/(Turun)
Belanja Modal Tanah	Rp -	Rp -	-
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp 172,634,550	Rp 135,137,500	Rp (37,497,050)
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp -	Rp -	-
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp -	Rp -	-
Belanja Modal Fisik Lainnya	Rp -	Rp -	-
Jumlah	Rp 172,634,550	Rp 135,137,500	-

Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada semester II per 31 Desember 2010 sebesar Rp. 172.634.550,- terdiri dari Pengadaan Alat Penangkal Peter sebesar Rp. 18.499.800,- Pengadaan Brankas sebesar Rp. 19.874.250,- Pengadaan PC unit sebesar Rp. 13.112.000,- Pengadaan Laptop sebesar Rp. 35.970.000,- Pengadaan Printer Rp. 12.259.500,- pengadaan Layar Projector sebesar Rp. 7.524.000,- Pengadaan LCD Projector sebesar Rp. 16.555.000,- Pengadaan Meja Resepsionis sebesar Rp. 41.844.000 dan Pengadaan AC Split Rp. 6.996.000,-

Laporan Keuangan Satuan Kerja Balai Besar Pelatihan Pertanian Binuang Semester II 2010

B.3. CATATAN PENTING LAINNYA

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Balai Besar Pelatihan Pertanian Binuang bernomor : 0181/018-10.2/XIII/2010 Tanggal 31 Desember 2009 sebesar Rp 7.310.995.000,-.

- Selain itu, Balai Besar Pelatihan Pertanian Binuang juga menerima SKPA nomor : SKPA.0030/WPB.11/KP.05/2010 Tanggal 02 Juni 2010 dari Badan Pengembangan SDM Pertanian sebesar Rp 150.290.000,- , SKPA nomor : SKPA.0268/WPB.12/KP.05/2010 Tanggal 24 Agustus 2010 dari Badan Pengembangan SDM Pertanian sebesar Rp 7.412.120.000, dan SKPA nomor : SKPA.516/WPB.12/KP.0522/2010 Tanggal 11 Nopember 2010 dari Badan Pengembangan SDM Pertanian sebesar Rp 1.162.646.000,-

Laporan Keuangan Satuan Kerja Balai Besar Pelatihan Pertanian Binuang Semester II TA. 2010

C. PENJELASAN ATAS POS- POS NERACA

C.1. PENJELASAN UMUM NERACA

a. Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi/sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah. Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, dan Aset Lainnya.

b. Kewajiban.

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu. Kewajiban pada satuan kerja dalam lingkup Kementerian Negara/Lembaga hanya berupa kewajiban kepada KPPN berupa keterlambatan penyampaian sisa uang persediaan dan kepada BUN/KPPN berupa pendapatan yang ditangguhkan.

c. Ekuitas Dana

Ekuitas dana merupakan kekayaan bersih pemerintah, yaitu selisih antara aset dan utang pemerintah. Ekuitas dana diklasifikasikan menjadi Ekuitas Dana Lancar dan Ekuitas Dana Investasi.

Komposisi Neraca per 31 Desember 2010 adalah sebagai berikut :

Uraian	31 Desember 2010	31 Desember 2009	% Naik/ (Turun)
Aset	Rp 10,580,707,263	Rp 10,408,072,713	Rp 172,634,550
Kewajiban	Rp -	Rp -	Rp -
Ekuitas Dana	Rp -	Rp -	Rp -

Laporan Keuangan Satuan Kerja Balai Besar Pelatihan Pertanian Binuang Semester II TA. 2010

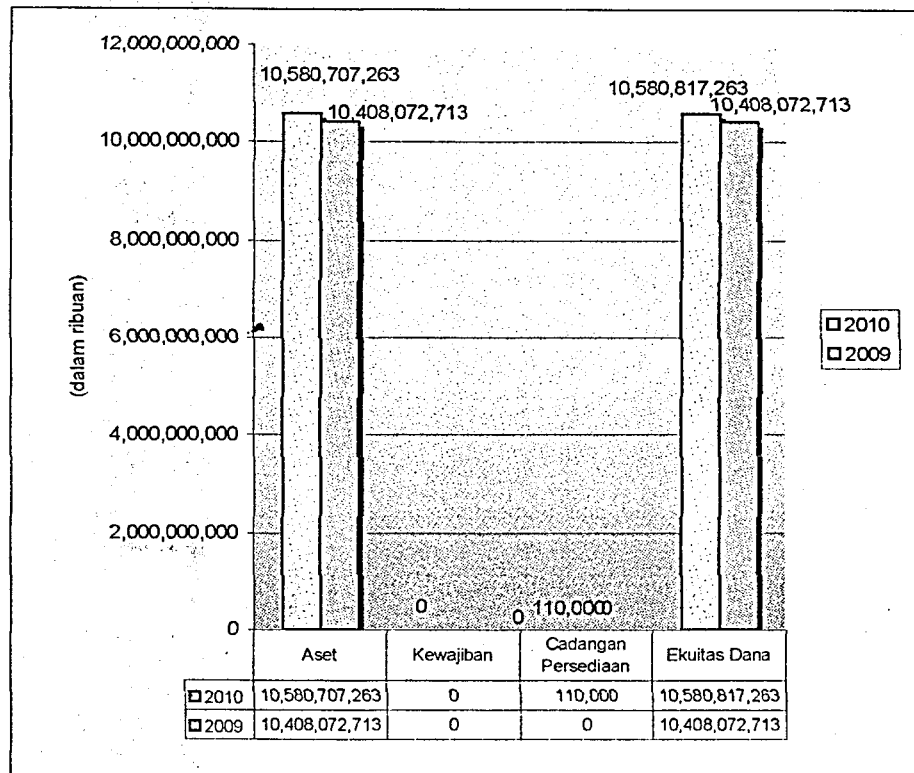
Jumlah Aset per 31 Desember 2010 sebesar Rp. 10.580.707.263,- terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp.0,- dan Aset Tetap sebesar Rp. 10.424.296.143,- Aset Lainnya sebesar Rp. 156.411.120,-

Jumlah Kewajiban per 31 Desember 2010 sebesar Rp. 0,- merupakan kewajiban jangka pendek.

Jumlah ekuitas dana per 31 Desember 2010 sebesar Rp. 10.580.817.263,- terdiri dari ekuitas dana lancar sebesar Rp. 110.500,- dan ekuitas dana investasi sebesar Rp. 10.580.707.263,-

Grafik komposisi neraca dapat disajikan seperti contoh dibawah ini

Grafik. Komposisi Neraca



C.2. PENJELASAN PER POS NERACA

C.2.1. Aset Lancar

C.2.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran pada *Balai Besar Pelatihan Pertanian Binuang* pada semester II tertanggal 31 Desember 2010 sebesar Rp. 0,- merupakan saldo kas pada bendahara pengeluaran. Jumlah di atas merupakan saldo kas/bank dari penerimaan uang persediaan dan Uang Tambahan Uang Persediaan yang Belum dipertanggungjawabkan (keterlambatan penyeteroran/sisa UP/TUP) secara definitif kepada Kas Negara pada tanggal neraca.

Jadi Pada tanggal 31 Desember 2010 Kas di Bendahara Pengeluaran tahun anggaran 2010 pada semester II masih ada sebesar Rp. 0,-

C.2.1.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan pada Balai Besar Pelatihan Pertanian Binuang pada tanggal 31 Desember 2010 sebesar Rp. 0,- merupakan saldo kas pada bendahara penerimaan. Kas di Bendahara Penerimaan adalah penerimaan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang sudah disetor ke Kas Negara pada tanggal neraca.

C.2.1.3 Piutang Pajak (khusus Departemen Keuangan)

Piutang Pajak sebesar Rp. 0,- merupakan tagihan pajak yang telah mempunyai surat ketetapan yang dapat dijadikan kas dan belum diselesaikan pada tanggal neraca yang diharapkan dapat diterima dalam jangka waktu tidak lebih dari satu tahun/per 31 Desember 2010.

Laporan Keuangan Satuan Kerja Balai Besar Pelatihan Pertanian Binuang Semester II TA. 2010

C.2.1.4 Piutang Bukan Pajak

Piutang Bukan Pajak sebesar Rp. 0,- merupakan piutang penerimaan negara bukan pajak, yaitu semua hak atau klaim terhadap pihak lain atas uang, barang atau jasa yang dapat dijadikan kas dan belum diselesaikan pada tanggal neraca yang diharapkan dapat diterima dalam jangka waktu tidak lebih dari satu tahun Piutang tersebut terdiri dari :

BL TPA Rp...

C.2.1.5 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA)

Jumlah Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) sebesar Rp.0,- merupakan saldo TPA yang akan jatuh tempo dalam Tahun Anggaran 2010.

BL TGR Rp...

C.2.1.6 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR)

Jumlah Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) sebesar Rp. 0,- merupakan saldo Tagihan TGR yang akan jatuh tempo dalam Tahun Anggaran 2010.

Piutang Lain-lain
Rp...

C.2.1.7 Piutang Lain-lain

Piutang Lain-lain sebesar Rp.0,- merupakan piutang yang tidak dapat diklasifikasikan ke dalam salah satu kategori piutang sebagaimana telah dijelaskan di atas yang diharapkan diterima pada tahun 2010.

Persediaan Rp...

C.2.1.8 Persediaan

Persediaan pada tanggal 31 Desember 2010 semester II sebesar Rp. 110.000,- merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca, yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Laporan Keuangan Satuan Kerja Balai Besar Pelatihan Pertanian Binuang Semester II TA. 2010

Aset Tetap Rp...

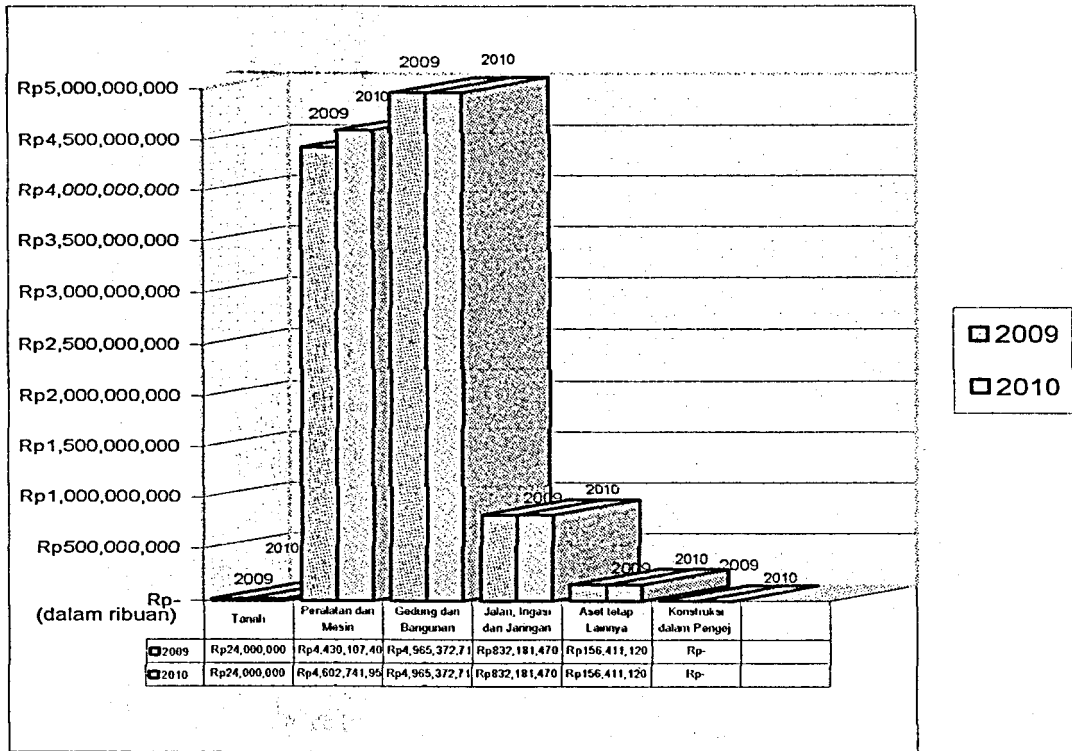
C.2.2. Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Nilai aset tetap pada tanggal 31 Desember 2010 sebesar Rp 10.580.707.263,- dengan perincian sebagai berikut:

Posisi aset tetap dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

No.	Uraian	per 31 Des 2010	per 31 Des 2009	% Naik / (Turun)
1	Tanah	Rp 24,000,000	Rp 24,000,000	Rp -
2	Peralatan dan Mesin	Rp 4,602,741,958	Rp 4,430,107,408	Rp 172,634,550
3	Gedung dan Bangunan	Rp 4,965,372,715	Rp 4,965,372,715	Rp -
4	Jalan Irigasi dan Jaringan	Rp 832,181,470	Rp 832,181,470	Rp -
5	Aset Tetap Lainnya	Rp 156,411,120	Rp 156,411,120	Rp -
		Rp -	Rp -	Rp -
	Jumlah	Rp 10,580,707,263	Rp 10,408,072,713	Rp 172,634,550

Laporan Keuangan Satuan Kerja Balai Besar Pelatihan Pertanian Binuang Semester II TA. 2010



C.2.2.1 Tanah

Tanah dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan. Apabila penilaian tanah dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai tanah didasarkan pada nilai wajar/harga taksiran pada saat perolehan.

C.2.2.2 Peralatan dan Mesin

Laporan Keuangan Satuan Kerja Balai Besar Pelatihan Pertanian Binuang Semester II TA. 2010

Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya perolehan atas Peralatan dan Mesin yang berasal dari pembelian meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan. Biaya perolehan Peralatan dan Mesin yang diperoleh melalui kontrak meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan dan jasa konsultan. Biaya perolehan Peralatan dan Mesin yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan Peralatan dan Mesin tersebut.

Posisi Perbandingan Peralatan dan Mesin

31 Desember 2010	31 Desember 2009	Kenaikan / (penurunan)
Rp4,602,741,958	Rp4,430,107,408	Rp172,634,550

Laporan Keuangan Tahunan 2010
 Departemen Keuangan
 Mutasi/perubahan Gedung dan Bangunan sebesar Rp,0,- tersebut adalah sbb:

Penambahan :		
Saldo Awal	Rp	4,430,107,408
Pembelian	Rp	172,634,550
Transfer Masuk	Rp	-
Pengembangan	Rp	-
Reklasifikasi Masuk	Rp	-
Jumlah	Rp	4,602,741,958
Pengurangan		
Transfer Keluar	Rp	-
Reklasifikasi Keluar	Rp	-
Koreksi Nilai	Rp	-
Jumlah	Rp	4,602,741,958

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan sampai dengan 31 Desember 2010 adalah sebagai berikut:

MAK	Uraian	Jumlah
533111	BM Gedung dan Bagunan	Rp -
522113	Belanja Jasa Konsultan (perencanaan Lanjutan Renovasi Bangunan Yang Dikapitalisasi (Belanja Modal untuk Gedung dan Bangunan)	Rp -
	Jumlah Belanja	Rp -

Penambahan Gedung dan Bangunan tidak sama dengan belanja modal, hal ini disebabkan terdapatnya penambahan Gedung dan Bangunan yang dipengaruhi oleh belanja sebagai berikut :

- Nilai penambahan Neraca Gedung dan Bangunan dari SAK sebesar Rp. 0,-
- Nilai penambahan Neraca Gedung dan Bangunan dari SIMAK BMN sebesar Rp. 0,-

C.2.2.3 Gedung dan Bangunan

Untuk Aset Tetap Gedung dan Bangunan tidak mengalami perubahan nilai Gedung dan Bangunan, pada periode 31 Desember 2010 sebesar Rp 4.965.372.715,-

C.2.2.4 Jalan Irigasi dan Jaringan

Untuk aset Jalan, Irigasi dan Jaringan tidak terjadi perubahan nilai pada dari posisi 31 Desember 2010 sebesar Rp 831.181.470,- tetap dengan nilai tersebut pada 31 Desember 2009.

Laporan Keuangan Satuan Kerja Balai Besar Pelatihan Pertanian Binuang Semester II TA. 2010

C.2.2.5 Aset Tetap Lainnya

Untuk Aset Tetap Lainnya tidak terjadi perubahan nilai pada dari posisi 31 Desember 2010 sebesar Rp 156.411.120,- tetap dengan nilai tersebut pada 31 Desember 2010.

C.2.3. Kewajiban Jangka Pendek

C.2.3.1 Uang Muka dari KPPN

Jumlah uang muka dari KPPN oleh Balai Besar Pelatihan Pertanian Binuang pada periode yang berakhir 31 Desember 2010 sebesar Rp 0,-

C.2.4. Ekuitas Dana Diinvestasikan

C.2.4.1 Diinvestasikan Dalam Aset Tetap

Untuk periode 31 Desember 2010 posisi Ekuitas dana yang Diinvestasikan Dalam Aset Tetap berjumlah Rp 10.580.707.263,- jumlah ini lebih besar jika dibandingkan dengan jumlah pada posisi 31 Desember 2009 yang berjumlah Rp 10.408.072.713,-

C.3 CATATAN PENTING LAINNYA

Balai Besar Pelatihan Pertanian Binuang Propinsi Kalimantan Selatan hanya memiliki satu rekening bank yang berada di Bank BNI Cabang Banjarbaru , dengan no rekening :0081309412.